MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCLXXIV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
6.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
7.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
8.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
9.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
10.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	122	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
11.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
12.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	148	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
13.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
14.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
15.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
16.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
	TOTAL	779	

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCLXXIV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 596 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
2.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
3.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23930	PUSKESMAS KONUT
4.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	419	DINAS KESEHATAN KAB. MURUNG RAYA
5.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
6.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	45515	PUSKESMAS DATAH KOTOU
7.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
8.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
9.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23933	PUSKESMAS TUMBANG OLONG
10.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	28610	RSUD PURUK CAHU
11.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
12.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
13.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23924	PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG
14.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
15.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
16.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	28610	RSUD PURUK CAHU
17.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
18.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	23926	PUSKESMAS BATU BUA
19.	AHLI PERTAMA - DOKTER	7	28610	RSUD PURUK CAHU
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	45515	PUSKESMAS DATAH KOTOU
21.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
22.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
23.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
24.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
25.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
26.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
27.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
28.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
29.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	23926	PUSKESMAS BATU BUA
30.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	45515	PUSKESMAS DATAH KOTOU
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23926	PUSKESMAS BATU BUA
33.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
34.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
35.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
36.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
37.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23933	PUSKESMAS TUMBANG OLONG
38.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
39.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
40.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23930	PUSKESMAS KONUT
41.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
42.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
43.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	6	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
44.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	33	28610	RSUD PURUK CAHU
45.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	23925	PUSKESMAS MUARA LAUNG
46.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	23930	PUSKESMAS KONUT
47.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
48.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
49.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
50.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	8	23929	PUSKESMAS SARIPOI
51.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	23926	PUSKESMAS BATU BUA
52.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	23924	PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG
53.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
54.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
55.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
56.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	419	DINAS KESEHATAN KAB. MURUNG RAYA
57.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
58.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
59.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
60.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23924	PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG
61.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23926	PUSKESMAS BATU BUA
62.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
63.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
64.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23930	PUSKESMAS KONUT
65.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
66.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	23933	PUSKESMAS TUMBANG OLONG
67.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	8	28610	RSUD PURUK CAHU
68.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
69.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	4	28610	RSUD PURUK CAHU
70.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
71.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
72.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	23926	PUSKESMAS BATU BUA
73.	TERAMPIL - BIDAN	2	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
74.	TERAMPIL - BIDAN	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
75.	TERAMPIL - BIDAN	2	23933	PUSKESMAS TUMBANG OLONG
76.	TERAMPIL - BIDAN	6	23930	PUSKESMAS KONUT
77.	TERAMPIL - BIDAN	26	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
78.	TERAMPIL - BIDAN	4	23926	PUSKESMAS BATU BUA
79.	TERAMPIL - BIDAN	6	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
80.	TERAMPIL - BIDAN	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
81.	TERAMPIL - BIDAN	7	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
82.	TERAMPIL - BIDAN	3	23924	PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG
83.	TERAMPIL - BIDAN	14	23929	PUSKESMAS SARIPOI
84.	TERAMPIL - BIDAN	15	28610	RSUD PURUK CAHU

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
85.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23930	PUSKESMAS KONUT
86.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23920	PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG
87.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
88.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
89.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
90.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
91.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
92.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
93.	TERAMPIL - PERAWAT	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
94.	TERAMPIL - PERAWAT	44	28610	RSUD PURUK CAHU
95.	TERAMPIL - PERAWAT	7	23933	PUSKESMAS TUMBANG OLONG
96.	TERAMPIL - PERAWAT	7	23930	PUSKESMAS KONUT
97.	TERAMPIL - PERAWAT	18	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
98.	TERAMPIL - PERAWAT	15	23929	PUSKESMAS SARIPOI
99.	TERAMPIL - PERAWAT	5	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
100.	TERAMPIL - PERAWAT	5	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
101.	TERAMPIL - PERAWAT	2	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
102.	TERAMPIL - PERAWAT	3	23926	PUSKESMAS BATU BUA
103.	TERAMPIL - PERAWAT	3	23925	PUSKESMAS MUARA LAUNG
104.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
105.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
106.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	4	28610	RSUD PURUK CAHU
107.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
108.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23925	PUSKESMAS MUARA LAUNG
109.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	45515	PUSKESMAS DATAH KOTOU
110.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
111.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	6	28610	RSUD PURUK CAHU
112.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
113.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23927	UPT PUSKESMAS MUARA TUHUP
114.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
115.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	4	28610	RSUD PURUK CAHU
116.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	28610	RSUD PURUK CAHU
117.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23922	PUSKESMAS PURUK CAHU
118.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23932	PUSKESMAS MUARA JOLOI
119.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23928	PUSKESMAS MAKUNJUNG
120.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23931	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI
121.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23921	PUSKESMAS TUMBANG BANTIAN
122.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23929	PUSKESMAS SARIPOI
123.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	23923	PUSKESMAS MANGKAHUI
124.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	28610	RSUD PURUK CAHU
	TOTAL	389		

BHINNEKA TUNGGAL IKA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCLXXIV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 596 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1 PARIWISATA;S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA;S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 PLANOLOGI;S-1 ARSITEKTUR;S-1 GEOGRAFI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 HUKUM;S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN DAERAH
10.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN
12.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
13.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
14.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 SOSIOLOGI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN
15.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI	3	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 KEHUTANAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
17.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	11	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
18.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL
19.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
20.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 ILMU PERTANIAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN
21.	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN	3	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ARSIPARIS;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN
25.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 EKONOMI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
27.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 KEARSIPAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
28.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
29.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU HUKUM;S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	6	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
30.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL
31.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEHUTANAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
32.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;S-1 SOSIOLOGI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
33.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
34.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAGEMEN;S-1 ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN
35.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ARSIPARIS;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN	4	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
36.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
37.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 SOSIOLOGI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
38.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEARSIPAN;S-1 MANAGEMEN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN
39.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
40.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SOSIOLOGI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU HUKUM	3	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA , SEKRETARIAT INSPEKTORAT , SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
41.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 ANTROPOLOGI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 GEOGRAFI;S-1 ARKEOLOGI;S-1 SENI RUPA;S-1 SENI KARAWITAN;S-1 SENI MUSIK	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
42.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PEKERJAAN SOSIAL	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL
44.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ARSITEKTUR	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ARSITEKTUR	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
47.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 AGROBISNIS;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN;S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 EKONOMI PERTANIAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
48.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL
49.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
50.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
51.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 EKONOMI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT TANAH SIANG
52.	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
53.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	5	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
54.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL
55.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
56.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN DAERAH
57.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SOSIOLOGI;S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
58.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
59.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
60.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
61.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTARI NEGERA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
62.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTARI NEGERA	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BHINNEKA TUNGGAL IKA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
64.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
65.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 HUKUM;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
66.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAGEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 KEHUTANAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
67.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 HUKUM;S-1 AKUNTANSI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
68.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEHUTANAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
69.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
70.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ELEKTRO;S-1 ELEKTRO KOMUNIKASI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN
71.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAGEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
72.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT TANAH SIANG
73.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN
74.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 SOSIOLOGI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
75.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
76.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 SOSIOLOGI;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 AKUNTANSI;S-1 KEHUTANAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU EKONOMI	3	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
77.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
78.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
79.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
80.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
82.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN
83.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 INFORMATIKA	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
84.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
85.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
86.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
87.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH
88.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
89.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
90.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
91.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
92.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
93.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
94.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN
95.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN;S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
96.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK	2	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
97.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	22	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
98.	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMK;SMA/SEDERAJAT	17	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
99.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN DAERAH
100.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		TOTAL	219	

BHINNEKA TUNGGAL IKA

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI